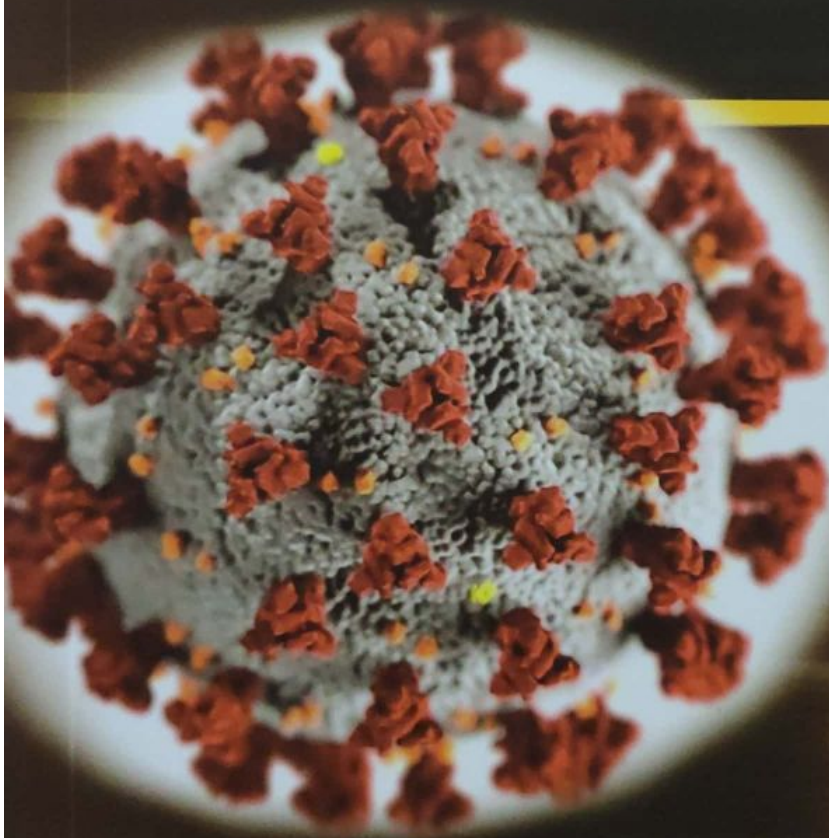


DIMENSI HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)



*Prof. Dr. H. Indar, S.H., MPH
Dr. Marwah Thaha, M.Si,
Leilani Ismaniar, S.H., M.Hukes.
Nur Inayah Ismaniar, SKM,. M.Kes
Fatihani Baso, S.H., MH*



PUSTAKA PELAJAR

DIMENSI HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)

Prof. Dr. H. Indar, S.H., MPH
Dr. Marwah Thaha, M.Si,
Leilani Ismaniar, S.H., M.Hukes.
Nur Inayah Ismaniar, SKM,. M.Kes
Fatihani Baso, S.H., MH



**DIMENSI HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19)**

Penulis

Prof. Dr. H. Indar, S.H., MPH

Dr. Marwah Thaha, M.Si,

Leilani Ismaniar, S.H., M.Hukes.

Nur Inayah Ismaniar, SKM., M.Kes

Fatihani Baso, S.H., M.H.

Rancang Cover

Wisnu

Tata Aksara

Dimaswids

Cetakan I, April 2021

Penerbit

Pustaka Pelajar

(Anggota IKAPI)

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 978-623-236-142-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Sambutan — vii

**Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin — vii**

Daftar Isi — ix

BAB I.

PENDAHULUAN — 1

A. Latar Belakang — 1

BAB II.

CORONAVIRUS DISEASE 19 — 5

A. Pendahuluan — 5

B. Pengertian COVID-19 — 6

C. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 — 11

D. Peraturan dan Pedoman Penanganan COVID 19 — 17

BAB III.

FUNGSIONALISASI HUKUM DALAM MASA COVID 19 — 25

A. Konsep Hukum — 25

B. Fungsi hukum sebagai “a Tool of Social Control” — 27

C. Fungsi Hukum sebagai “a Tool of Social Engineering” — 29

- D. Fungsi Hukum Sebagai Integrator – 31
- E. Fungsi Hukum sebagai Simbol – 33
- F. Fungsi Hukum sebagai "a political instrument", – 34

BAB IV. EFEKTIVITAS HUKUM MASA PANDEMI COVID 19 – 39

- A. Pendahuluan – 39
- B. Pengertian Efektivitas Hukum – 40
- C. Hierarkhi dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangaan – 47
- D. Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*) – 52
- E. Kepatuhan Hukum (*Legal Obedience*) – 54
- F. Penegakan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Masa Pandemi COVID-19 – 56

BAB V. UTILITAS HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PANDEMI COVID 19 – 65

- A. Hukum Kesehatan Masyarakat – 65
- B. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah – 67
- C. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana – 69
- D. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan – 71
- E. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar – 73
- F. Peraturan Menteri Kesehatan No 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan – 74
- G. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) – 74
- H. Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat – 76
- I. Keputusan Presiden NO. 12 TAHUN 2020 tentang

- Covid-19 sebagai Bencana Non Alam – 78
- J. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 – Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Wabah Covid 19. – 85

BAB VI.

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR — 91

- A. Pendahuluan – 91
- B. Dasar Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) – 93
- C. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) – 101

BAB VII.

PROTOKOL KESEHATAN — 115

- A. Pendahuluan – 115
- B. Protokol Kesehatan COVID-19 – 116
- C. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 118
- D. Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Protokol Kesehatan COVID 19 – 121
- E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular – 128
- F. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. – 129
- G. Instruksi Presiden No. 6 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. – 129

BAB VII.

TANGGUNG JAWAB HUKUM VAKSINASI COVID-19 — 135

- A. Pendahuluan – 135
- B. Tanggung Jawab Hukum atas Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 – 136
- B. Tanggung jawab Hukum Penyelenggaraan Vaksinasi

terhadap Kesehatan Masyarakat – 147
C. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Vaksinasi
COVID-19 – 151

DAFTAR PUSTAKA – 179

INDEKS – 186

TENTANG PENULIS – 188

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 1995. Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan. P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi, K. 1986. Peranan Hukum Dalam Menciptakan Disiplin Sosial Masyarakat. M.Arena Hukum. 1:42-56, Malang.
- Ali, A. 1999a. Pengadilan dan Masyarakat. Hasanuddin University Press, Makassar.
- . 1999b. Sistem Hukum . Saduran, FH Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andi H, Dahlan. 2008. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta;
- Arifin DA. 2016; Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan. J Idea Huk. 2.
- Bima Baskara. Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19.Hr Kompas 18 April 2020
- Cassette, A. 1993. Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- David Alexander. 2013. Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey Hazards and Earth System Sciences Discussions 1 (2),.
- Endang Wahyati Yustina, 2012,Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung

- Gostim Lawrence O. 2007. *Law In Public Health*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
- Grad, F.P. 1990. *The Public Health Law*. American Public Health Association, Washington
- Gst Nyoman Indrawati Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Covid 19 Kompas.com 31 Agustus 2020 10:10:53 WITA
- Ilyas A, Widaningsih Y. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education;
- Indar H. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Lemb Penerbit Univ Hasanudin;
- Indar. 2010. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Indar. (2019). *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indar,et al, 2019 THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE HOSPITAL ON THE USE OF FAKE VACCINES. *Journal. Enfermeria CLINICA*,
- Indar. 2010. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Indar. 2019. *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iskandar Dalmy, 1998. *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Karo, M. B. 2020. *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Hardiknas
- Kementerian Kesehatan RI. 2020a. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-5*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020b. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*. from Maret, 2020 <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000. *Mengenal Hukum*, Liberty,

Yogyakarta

- M. Guntur Hamzah. 2020. **Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama**. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Juni 2020.
- Mirza Nasution. 2020. **Politik Hukum dan Regulasi-Regulasi Penanganan Covid-19**. Disampaikan dalam Webinar APHTN-HAN Sumatera Utara, 2 Juni 2020.
- Muh. Hasrul. **Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**. Jurnal Legislatif. Vol.3 No..2 Juni 2020
- Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan COvid 19.SPRIPIM POLRI Jln Trunojoyo. No. 3 Kab. Baru.Jakarta Selatan.
- Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Coronavirus (2019-nCoV) untuk Pemerintah Daerah" Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19.2020.
- Petunjuk Teknis Pelayanan PUSKESMAS Pada Masa Pandemi COVID-19 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2020
- Kusuma Endang,, 2009 **Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit**, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sabrina. 2020. **Penerapan Pancasila dalam Upaya Penanganan COVID-19**. Provinsi Sumatera Utara.
- Sjawie HF. 2018. **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR**. Prenada Media;
- Susila, M. Endriyo.2020 **Penolakan PROTOKOL COVID 19: Perspektif Hukum Pidana**
- Soesilo, R. 1976. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. "Penerbit Politea". Bogor
- Velavan, T.P & Meyer, C.G. 2020 **The COVID-19 Epidemik**. *Tropical Medicine and International Health* 25(3) 278-280 <https://doi.org/10.1111/tmi.13383>

WHO.2020. Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation. Report-1
Wiku B. Adisasmito Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik
dari Rata-rata Dunia Kompas.com - 31/10/2020, 16:18 WIB
Yanto M.P. Ekon, 2020. Aspek Hukum Pencegahan dan
Penanggulangan Dampak Penularan COVID-19 By Dr.
SH.,M.Hum (Fakultas Hukum-UKAW) Kompas.com -
16/11/2020,21:15 WIB Android: <https://bit.ly/3g85pkA>
iOS: <https://apple.co/3hXWJ0L>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
- Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID -19)
- Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Permenkes No. 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Keputusan Menteri Kesehatan NO. HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No. 6 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia
- Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu

- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan CORONA-19.
- Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
- Keputusan Kepala BNPB No. 13a Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
- Surat Edaran Kepala BNPB No:SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/III/375/220 Tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-19
- Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Menpan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya pencegahan Penyebaran COVID-19.
- Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Pada Satuan Pendidikan.
- Surat Edaran KPK No. 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Edaran Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19
- Surat Edaran Kepala BKN No. 10/SE/IV/2 020 tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona

- Surat Edaran Mendagri No.:440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah
- Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-
- Siaran Pers Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.MEKON.2.3/03/2020 tentang Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

ARTIKEL. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia.

- Artikel Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 14/09/2020 kominfo samosir Berita,
- Lipsus Lebaran 2020 Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19 Tanggapan Jumat, 22 May 2020
- Gelar Perkara Perppu COVID-19 Majalah Konstitusi NO. 159
 - Mel 2020 - ISSN: 1829 7692

TENTANG PENULIS



PROF. DR. H. INDAR, SH, MPH lahir di Makassar 10 November 1953. Guru Besar Etika dan Hukum Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Hasanuddin, Makassar. Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Unhas Tahun 1984, Pendidikan S-2 pada Univ. of Hawaii at Manoa USA Tahun 1990. Gelar Doktor di bidang Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Univ. Hasanuddin Tahun 2003 dengan judul Disertasi "Perspektif Hak-Hak Atas Pemeliharaan Kesehatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kota Makassar dan Parepare". Anggota Pusat Pemberi Pelayanan Bantuan Hukum Indonesia (P3BHI) Makassar . Dosen Luar Biasa FKM Univ. Panca Sakti Makassar, FKM Univ. Indonesia Timur Makassar, STIK Tamalate Makassar, STIK Makassar, STIK Baramuli Kabupaten Pinrang, STIKES Nani Hasanuddin Makassar, Akademi Hiperkes Penyusun Hospital Bylaws RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ketua STIK Tamalatea 2014-2015. Saat ini Ketua Senat FKM UH dan Sekretaris Dewan Kehormatan Universitas Hasanuddin.



Marwah Thaha, M.Si, lahir di Makassar, 26 April 1965, adalah staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli, menempuh pendidikan awal di Universitas Hasanuddin, Fakultas Fisipol Jurusan Administrasi Negara dan lulus tahun 1990, S2 Universitas Hasanuddin Jurusan Administrasi Pembangunan dan lulus tahun 1999. Gelar Doktor dibidang ilmu Kesehatan Masyarakat, Jurusan Administrasi dan Kebijakan kesehatan, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2021.



Leilani Ismaniar, S.H., M.Hukes. lahir di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 15 April 1990 adalah staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli, menempuh pendidikan awal di Univ. Hasanuddin Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana lulusan tahun 2012 di Makassar. Kemudian melanjutkan Program Magister di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Jurusan Hukum Kesehatan lulusan tahun 2017 di Makassar.



Nur Inayah Ismaniar, SKM.,M.Kes adalah staf dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli, menempuh pendidikan awal di Universitas Hasanuddin Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan lulusan Tahun 2013 di Makassar, melanjutkan Program Magister di Universitas Hasanuddin Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat

Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan lulusan Tahun 2015 di Makassar.



Fatihani Baso, S.H., M.H. adalah Dosen di Fakultas Syariah IAIN Kendari, menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dan lulus Tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dan lulus Tahun 2018. Saat ini aktif sebagai Editor Jurnal Al-'Adl Fakultas Syariah IAIN Kendari dan Reviewer di Alauddin Law Development Journal (ALDEV).

Pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia tentunya. Pandemi Covid 19 mengubah segala tatanan yang selama ini telah dijalani oleh manusia yang hidup di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Perlu ada aturan-aturan baru yang akan mengubah kehidupan manusia ataupun gaya hidupnya, karena untuk mencegah dan menanggulangi perkembangan dan penularan Covid-19 ini dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya. Negara/Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum itu supaya masyarakatnya bisa hidup dengan baik dan sehat di tengah-tengah Pandemi Covid-19.

Menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat di semua tatanan termasuk Kampus. Didasari dengan program Kampus Sehat atau kampus berbasis promosi kesehatan yang mulai dikembangkan pada 2019 oleh Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia, maka masyarakat kampus memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pandemi Covid-19 dengan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Melalui buku ini diharapkan masyarakat kampus mendapat petunjuk secara umum dalam penerapan Kampus Siaga Covid-19 sehingga pola pikir dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Kampus Siaga Covid-19 dapat lebih terarah dan dapat berjalan dengan baik. Buku ini disusun menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, namun diharapkan dapat juga diterapkan pada kemungkinan terjadinya situasi pandemi lain. Penyusunan buku panduan ini dikerjakan dengan menggunakan pemikiran yang mendalam, namun diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang sangat dinamis.




Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur LM 11648 Yogyakarta 55171
Telp. (0274) 381843 Fax. (0274) 363063
Email: pustakapelar@pustaka-pelajar.com
Website: pustakapelar.com